

**Profil Rumah Tangga Miskin Ekstrem di Perkotaan
(Kasus pada Komunitas Taru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat)**

***Profile of Extremely Poor Households in Urban Area
(Case in the Taru Community, North Bogor Subdistrict, Bogor City, West Java)***

Silvia Nuranti Setianingdiah^{*}, Nuraini Wahyuning Prasodjo

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

^{*}E-mail korespondensi: silvianuranti@apps.ipb.ac.id

Diterima: 23 Juni 2023 | Direvisi: 14 Juni 2024 | Disetujui: 19 Juni 2024 | Publikasi Online: 26 Juni 2024

ABSTRACT

Poverty is an issue that the Indonesian government prioritizes in its handling. Extreme poverty tends to be centered in urban areas. This paper aims to analyze and mapping the profile of extreme poor households at a poor community in Bogor city. The census method is used to investigate extreme poverty in a community which is emicly known as a poor community. The research found that there were 31 percent of extreme poor households consisting of the category of very poor households (15%) and the category of destitute households (16%). In term of socio-economic demographics, extreme poor households are headed by female (36,8%) and male (63,2%). Extreme poor households are predominantly headed by elderly people (≥ 60 years old), have no savings, and live in densely populated areas with in adequate facilities.

Keywords: extreme poverty, poverty, urban households

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi isu utama yang diprioritaskan pemerintah Indonesia untuk diatasi. Isu kemiskinan ekstrem terutama muncul di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan memetakan profil kemiskinan ekstrem yang terjadi pada satu komunitas miskin di kota Bogor. Metode sensus digunakan untuk menyelidiki satu komunitas yang secara emic diakui sebagai komunitas miskin. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 31 persen rumah tangga miskin ekstrem yang terdiri dari 15 persen rumah tangga sangat miskin dan 16 persen rumah tangga melarat. Secara socio-economic demografis, rumah tangga miskin ekstrem dikepalai oleh perempuan (36,8%) dan dikepalai oleh laki-laki (63,2%). Rumah tangga miskin ekstrem secara dominan dikepalai oleh warga lanjut usia (≥ 60 tahun), tidak memiliki tabungan, dan menempati hunian di lingkungan padat dengan fasilitas kurang memadai.

Kata kunci: kemiskinan ekstrem, kemiskinan, rumah tangga perkotaan

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu penting dalam pembangunan. Sejumlah besar negara menyepakati untuk memprioritaskan upaya pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem di negaranya masing-masing, termasuk Indonesia. Kesepakatan dan komitmen itu tertuang pada salah satu dari 17 tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu *no poverty* (Hidayat, 2022). Indonesia sebagai salah satu negara yang turut meratifikasi SDGs, telah menyatakan komitmennya melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan didefinisikan oleh United Nations (1995) sebagai suatu kondisi keterbatasan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk miskin Indonesia cenderung berpusat di daerah perkotaan Jawa terutama di Jawa Barat (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2011). Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023), Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan angka kemiskinan ekstrem dari 895,64 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 941,84 ribu jiwa pada tahun 2022. Di tingkat kota, kenaikan angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Barat tercermin dari kenaikan angka kemiskinan ekstrem di Kota Bogor yaitu dari 13,9 ribu jiwa pada tahun 2021 naik menjadi 14,45 ribu jiwa pada tahun 2022. Data yang lebih menukik lagi disampaikan oleh Wali Kota Bogor bahwa di bawah wilayah kota dimana komunitas Taru berada tengah mengalami kenaikan indeks keparahan kemiskinan yaitu dari 0,17 pada tahun 2017 menjadi 0,27 pada tahun 2021 (kotabogor.go.id). Kenaikan indeks tersebut menggambarkan pula adanya ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin tinggi (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kemiskinan ekstrem sebagai salah satu kategori kemiskinan terparah dalam pemenuhan standar kebutuhan minimum memiliki ukuran-ukuran khusus (United Nations, 1995). Bila mengacu World Bank (2015), ukuran kemiskinan ekstrem ditunjukkan dengan indikator pendapatan penduduk yang tidak melebihi \$1,90/kapita/hari. Badan Pusat Statistik (2021) kemudian membuat konversi ukuran kemiskinan ekstrem itu untuk situasi Indonesia secara umum, yaitu pendapatan penduduk yang tidak melebihi Rp11.941/kapita/hari. Sementara Sajogyo (1977) telah lebih dari 4 dekade lampau membuat suatu ukuran kemiskinan yang berbeda untuk wilayah kota dan desa. Ia menciptakan konsep “garis kemiskinan” sebagai batas pemisah antara penduduk miskin dan tidak miskin, serta menyusun ukuran tingkat keparahan kemiskinan yang disebutnya sebagai “miskin”, “miskin sekali” dan “paling miskin/melarat”. Terminologi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang dinyatakan oleh *World Bank* maupun BPS, meski tidak dinyatakan oleh Sajogyo, namun boleh jadi menyerupai istilah “melarat” dalam terminologi Sajogyo.

Sajogyo menentukan garis kemiskinan sebagai batas ukuran kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasar yang nilainya dikonversi ke dalam nilai tukar beras. Gradasi keparahan kemiskinan Sajogyo untuk wilayah kota yaitu: (1) “miskin” (setara nilai tukar ≤ 480 kg beras/kapita/tahun), (2) “miskin sekali” (setara nilai tukar ≤ 360 kg beras/kapita/tahun), dan (3) “melarat” (setara nilai tukar ≤ 270 kg beras/kapita/tahun). Tingkat keparahan kemiskinan untuk wilayah desa diukur dari: (1) “miskin” (setara nilai tukar ≤ 320 kg beras/kapita/tahun), (2) “miskin sekali” (setara nilai tukar ≤ 240 kg beras/kapita/tahun), dan (3) “melarat” (setara nilai tukar ≤ 180 kg beras/kapita/tahun).

Selain dari parameter pendapatan, tingkat kemiskinan juga dapat dipetakan dari indikator sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh BKKBN (2011). BKKBN mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan tahapan kesejahteraan keluarga melalui 21 indikator. Meski tidak menggunakan istilah “kemiskinan ekstrem”, namun BKKBN juga melakukan upaya memetakan tingkat keparahan kemiskinan pada unit analisis keluarga. Dari istilah yang digunakan BKKBN yaitu Keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus, tampaknya kondisi kemampuan pemenuhan kebutuhan keluarga terparah yang digambarkan oleh BKKBN tercermin dari istilah Keluarga Pra-Sejahtera.

Adanya ragam ukuran yang digunakan untuk memetakan kondisi kemiskinan dan tingkat keparahan dalam memenuhi kebutuhan dasar di tingkat individu, keluarga maupun rumah tangga, mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya profil kemiskinan yang paling parah pada unit rumah tangga pada komunitas perkotaan. Deskripsi potret kemiskinan yang terparah di perkotaan ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih baik kondisi kehidupan warga yang paling marjinal dan paling rentan terhadap goncangan situasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Komunitas Taru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan atas pertimbangan yaitu: (1) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), komunitas Taru merupakan lokus yang mengalami kenaikan indeks keparahan kemiskinan dan sebagai salah satu lokus yang memiliki angka kemiskinan tinggi, (2) berdasarkan pendekatan *emic* ditemukan sejumlah besar rumah tangga yang diakui warga setempat sebagai rumah tangga miskin, (3) tergambar ciri umum kemiskinan perkotaan berupa infrastruktur fisik yang kurang memadai seperti rumah tidak layak huni, posisi rumah sangat berdekatan, dan penghuni dalam satu rumah sangat padat. Lokasi penelitian dipusatkan pada satu RW (RW 10) dan 5 RT terpadat penduduk (RT 1,4,5,6 dan 7).

Unit analisis penelitian ini adalah rumah tangga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sensus, yaitu pengumpulan data dimana seluruh unit dari populasi diteliti satu per satu (Supranto, 2000). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga miskin yang kriterianya ditentukan oleh warga setempat (pendekatan *emic*). Rumah tangga yang dianggap 'miskin' ditentukan oleh warga setempat melalui teknik triangulasi yaitu pengecekan kepada multipihak, diantaranya para ketua RT, tokoh informal masyarakat, dan para aktivis penggerak masyarakat (kader posyandu/posbindu).

Penentuan populasi rumah tangga miskin secara *emic* dilakukan 4 tahap. Pertama, jumlah rumah tangga miskin di RW 10 diperoleh dari DKM (Dewan Keluarga Masjid) yang telah memiliki data rumah tangga/keluarga fakir (diperoleh 84 rumah tangga fakir). Kedua, melakukan verifikasi data DKM tersebut kepada para ketua RT setempat sehingga terverifikasi sejumlah 75 rumah tangga miskin. Jumlah rumah tangga miskin berkurang dari data yang diperoleh pada tahap awal karena terverifikasi rumah tangga yang pindah domisili, warga yang telah meninggal dunia dan rumah tangga yang baru terdata sebagai janda/lansia. Ketiga, melakukan verifikasi silang (triangulasi) kepada para aktivis penggerak masyarakat (para kader posyandu/posbindu/kader RT) dibandingkan dengan data penerima bantuan sosial dan jumlah tanggungan rumah tangga. Pada tahap ketiga ini teridentifikasi rumah tangga miskin sebanyak 61. Keempat, tahap terakhir peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung secara sekilas terhadap bangunan tempat tinggal rumah tangga yang dikategorikan miskin tersebut. Akhirnya pada tahap terakhir ini, diperoleh data populasi seluruh rumah tangga miskin di RW 10 yang ditentukan secara *emic* yaitu sebanyak 61 rumah tangga.

Data profil rumah tangga miskin ekstrem secara kuantitatif dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur, sedangkan secara kualitatif dikumpulkan menggunakan panduan wawancara. Responden yang diwawancarai berjumlah 61 orang, yang masing-masing responden mewakili dan memberikan data tentang rumah tangganya. Rumah tangga miskin, termasuk rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin ekstrem, akan diidentifikasi menggunakan tiga pendekatan sekaligus dan kemudian temuan dari ketiga pendekatan itu akan dibandingkan. Pendekatan untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin di perkotaan yang digunakan adalah (1) rumah tangga miskin menurut pendekatan *emic*, (2) rumah tangga miskin perkotaan menurut indikator yang digagas oleh Sajogyo, dan (3) rumah tangga miskin ekstrem menurut indikator yang digagas oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Pengolahan dan analisis data kuantitatif menggunakan *Microsoft Excel 2013*. Sementara pengolahan dan analisis data kualitatif hasil wawancara mendalam dikelola secara manual melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan sejak bulan Januari sampai Juni 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Komunitas Taru

Komunitas Taru merupakan salah satu komunitas yang terletak di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Komunitas Taru pada penelitian ini yaitu seluruh 'rumah tangga miskin' yang bermukim di 5 RT di lingkungan kecamatan Bogor Utara. Rumah tangga ini dikategorikan miskin berdasarkan pendekatan *emic*. Komunitas ini berada di wilayah pemukiman padat penduduk yang dilintasi oleh aliran sungai kecil. Pemukiman yang terdekat dengan bantaran sungai sering terdampak banjir karena pola musiman hujan deras. Kondisi sungai yang sempit serta dipenuhi sampah limbah rumah tangga, seringkali membawa dampak banjir yang parah terutama pada pola 5 tahunan. Pada tahun 2022, banjir yang melanda sekitar bantaran sungai menewaskan satu korban jiwa.

Ciri kemiskinan perkotaan sekilas teramati pada saat penelitian, diantaranya adalah: (1) tata ruang, (2) interaksi antar warga, (3) kelembagaan ekonomi yang muncul sebagai bentuk respon terhadap kondisi keterbatasan finansial. Dalam hal tata ruang, rumah tangga miskin ini tinggal di lingkungan padat penduduk. Bangunan rumah jaraknya sangat berdekatan. Selain itu, banyak ditemukan bangunan rumah yang kondisinya rusak, baik rusak ringan maupun rusak parah seperti tembok retak yang berpotensi ambruk. Di dalam satu bangunan rumah, umumnya dihuni paling sedikit dua rumah tangga. Masing-masing rumah tangga yang terdiri dari 3-4 orang menempati satu kamar ukuran kecil.

Interaksi antar warga komunitas miskin ini masih tergolong intens. Hal tersebut karena jarak antar rumah saling berdekatan dan antar warga saling memiliki ikatan kekerabatan. Kerjasama dalam bentuk tolong-menolong dan gotong royong masih tampak. Situasi guyub rukun di kalangan anggota komunitas digambarkan oleh informan sebagai berikut:

"...Masih guyub, di RT 01 ada dua kelompok yaitu kelompok yang tinggal di bawah sama atas. Kalau yang tinggal di atas peka bantu-membantu. Ada uang kebersihan Rp20.000 per bulan. Kalau ada yang meninggal, ada yang nagihan uang iuran kematian..." (J, Kader RT 01, 16/4/2023).

Dari kutipan pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa meski dalam keadaan keterbatasan kemampuan finansial, kebanyakan anggota komunitas miskin masih mengupayakan gotong royong dan tolong-menolong mengatasi kebutuhan bersama di antara anggota komunitas. Sebaliknya, kegiatan kerja bakti (kegiatan untuk kepentingan umum yang diupah) hampir tidak ditemukan lagi.

Salah satu kelembagaan ekonomi yang muncul akhir-akhir ini serta dianggap sebagai salah satu alternatif jalan keluar bagi kesulitan ekonomi warga komunitas adalah kelembagaan "Bank Emok". Meski telah dilarang oleh pengurus Rukun Tetangga (RT), namun aktivitas "bank emok" ini tetap dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. "Bank Emok" adalah lembaga pinjaman finansial yang pelaku pemberi pinjamannya adalah orang luar komunitas dan penerima pinjaman adalah orang-orang di dalam komunitas. Sebagaimana umumnya kelembagaan ekonomi yang lain, Bank Emok beroperasi dalam batasan aturan-aturan tertentu, dilakukan oleh para pelaku, menunjukkan tindakan-tindakan berpola di kalangan pelaku, serta didukung dengan peralatan tertentu. Salah seorang informan mengungkapkan apa yang mereka pahami sebagai Bank Emok: "

"...Bank Emok, awalnya dikenalin ke warga seperti "koperasi". Disebut Bank emok tuh karena pas kegiatan kita pada duduk-duduk ngariung. Kalau mau pinjam uang, perjanjiannya dibacain dulu". (HN, Kader RT 05, 16/4/2023).

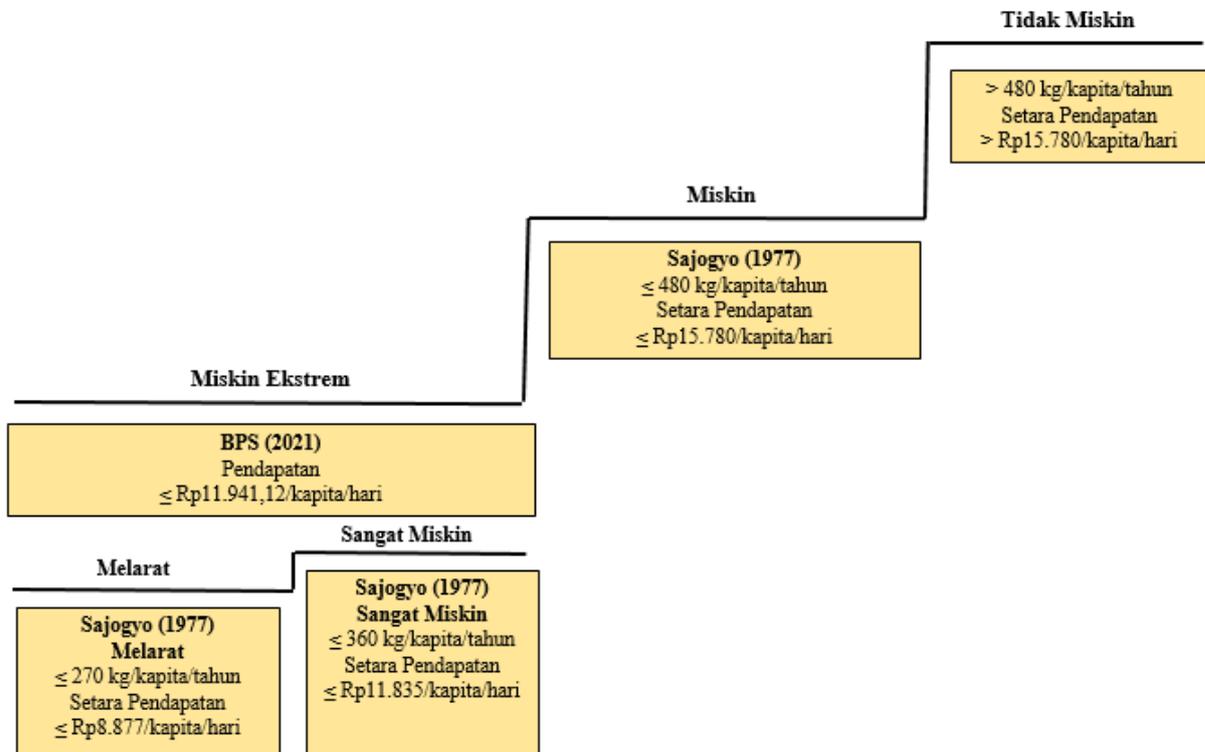
Lembaga pinjaman keuangan ini beroperasi dengan "sangat cair". Biasanya para pemberi pinjaman akan mendatangi salah satu rumah warga komunitas sebagai tempat berkumpul anggota kelompok peminjam untuk melakukan transaksi. Pertemuan dilakukan seminggu sekali untuk membahas peminjaman baru ataupun menagih cicilan pembayaran dari pinjaman anggota kelompok sebelumnya. Secara singkat, aturan peminjaman uang dari Bank Emok sebagai berikut: (1) pinjaman diberikan kepada individu yang bernaung dalam satu kelompok yang biasanya beranggotakan 10 orang, (2) besar pinjaman per orang tergantung kesepakatan kedua pihak (pemberi dan pemohon pinjaman), (3) tenggat waktu pengembalian pinjaman adalah satu tahun dengan bunga pinjaman sekitar 30% per tahun. Misalnya: individu A meminjam uang sebesar Rp2 juta, maka setiap seminggu sekali dalam kurun waktu satu tahun, A harus mencicil pengembalian pinjaman sebesar Rp50.000,-. Apabila A saat itu tidak mampu membayar, maka anggota kelompoknya harus menalangi terlebih dahulu (sistem "tanggung renteng"). Dengan demikian, selama kurun waktu satu tahun (52 minggu), A mengembalikan pinjaman sebesar Rp2.600.000,-

Peta Kemiskinan pada Komunitas Taru

Kemiskinan pada penelitian ini diukur dari pendapatan per rumah tangga yang kemudian dibagi sejumlah anggota rumah tangganya, sehingga diperoleh angka pendapatan per kapita sesuai indikator tingkat kemiskinan per kapita menurut Sajogyo (1977) dan irisannya dengan indikator kemiskinan ekstrem mengacu (Badan Pusat Statistik, 2021).

Gambar 1 menunjukkan bahwa rumah tangga perkotaan dikategorikan dalam rumah tangga miskin ekstrem (menggunakan indikator BPS) apabila rumah tangga memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangganya rata-rata sebesar \leq Rp11.941/kapita/hari. Sementara bila menggunakan indikator kemiskinan Sajogyo (1977), rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin ekstrem di perkotaan (dalam istilah Sajogyo; "melarat") bila rumah tangga memiliki pendapatan

untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangganya rata-rata hanya sebesar \leq Rp8.877/kapita/hari. Di sini tampak bahwa menurut prediksi Sajogyo di perkotaan ditemukan kelompok rumah tangga yang sangat parah kondisinya, lebih parah dibandingkan ukuran yang digunakan secara umum oleh Badan Pusat Statistik (2021). Irisan rumah tangga yang dikategorikan secara umum ke dalam kelompok rumah tangga miskin ekstrem menurut Badan Pusat Statistik (2021) adalah setara dengan rumah tangga “melarat” dan rumah tangga “sangat miskin” menurut kategori Sajogyo (1977).



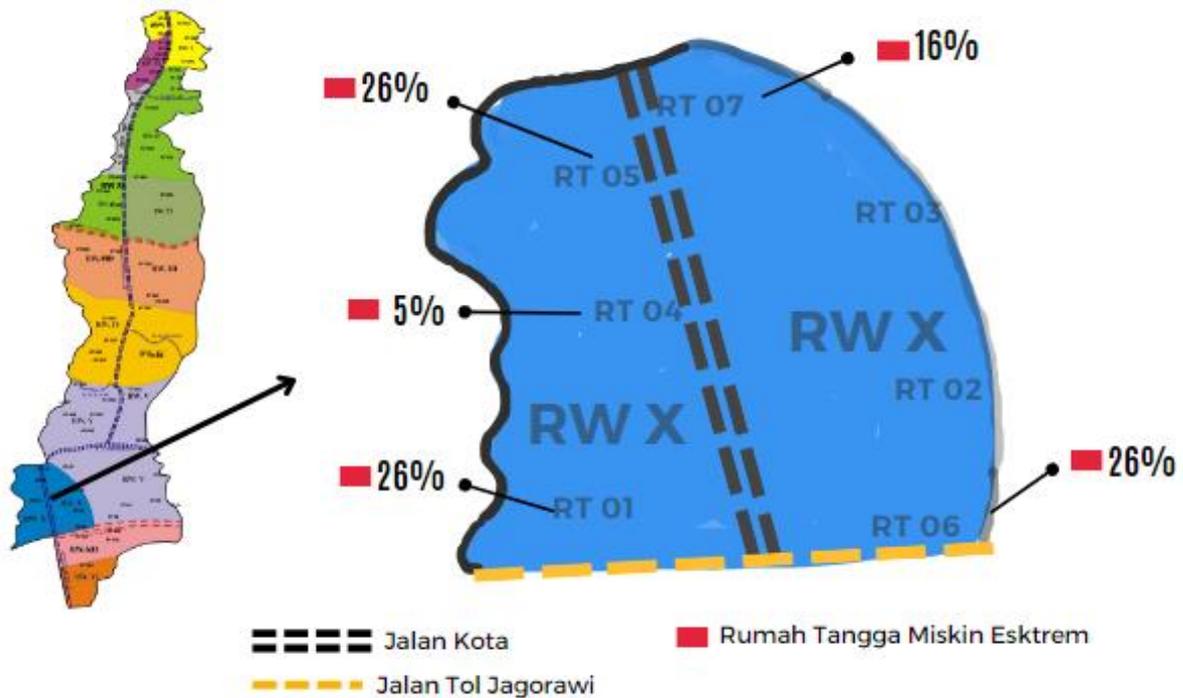
Gambar 1. Indikator tingkat kemiskinan (Sajogyo, 1977) dan indikator kemiskinan ekstrem (Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan kedua acuan tersebut, penelitian ini selanjutnya mencoba memetakan derajat kemiskinan rumah tangga yaitu miskin ekstrem, miskin, dan tidak miskin. Batas kemiskinan di tingkat rumah tangga diukur dari apakah pendapatan rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum dari setiap anggota rumah tangga. Meskipun sejak awal secara empiris telah ditentukan bahwa populasi yang diteliti adalah seluruh rumah tangga miskin, namun tidak menutup kemungkinan ketika diamati menggunakan acuan indikator kemiskinan Sajogyo (1977) dan indikator kemiskinan ekstrem Badan Pusat Statistik (2022), status rumah tangga miskin di lokasi penelitian menjadi berbeda. Berikut adalah hasil pemetaan tingkat kemiskinan pada Komunitas Taru (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dan persentase rumah tangga menurut kategori kemiskinan pada Komunitas Taru, Tahun 2023.

Tingkat Kemiskinan	Jumlah	Persentase (%)
Miskin Ekstrem (sangat miskin & melarat)	19	31,1
Miskin	7	12,0
Tidak Miskin	35	57,4
Total	61	100,0

Seluruh rumah tangga yang berstatus miskin ekstrem (19 rumah tangga) pada komunitas Taru tersebar terutama di 3 RT yaitu RT 01, RT 05, dan RT 06. Pendapatan rumah tangga bagi yang masih memiliki mata pencaharian relatif kecil dan tidak memadai untuk menghidupi seluruh anggota rumah tangga yang ditanggung. Ditemukan pula kepala rumah tangga yang tidak bekerja lagi. Mereka umumnya adalah para lansia dan para janda. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang dikepalai lansia dan janda ini



Gambar 2. Denah lokasi sebaran rumah tangga miskin ekstrem pada Komunitas Taru, tahun 2023.

tidak menentu tergantung belas kasihan dan pemberian kerabat yang tinggal dalam satu komunitas maupun kerabat di luar lokasi penelitian. Kondisi keterbatasan ekonomi terus menerus menimbulkan sikap apatis pada sebagian kepala rumah tangga miskin, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden:” *Penghasilan kecil...Biarin dah yang penting mah kerja jalani gitu aja.*” (R, RT 05, 11/4/2023).

Profil Rumah Tangga Miskin Ekstrem

Profil rumah tangga miskin ekstrem pada komunitas yang diteliti akan ditinjau dari: (1) profil kepala rumah tangga dan (2) kondisi lingkungan tempat tinggalnya (Tabel 2). Umumnya rumah tangga miskin ekstrem di lokasi penelitian dikepalai oleh laki-laki (63,2%). Namun demikian, tampak pula gejala yang cukup luar biasa karena lebih dari sepertiga rumah tangga miskin ekstrem dikepalai oleh perempuan (36,8%). Gejala rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan tergolong tinggi dan rumah tangga mereka juga dalam kondisi kemiskinan yang parah sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari komunitas maupun pemerintah lokal. Kepala rumah tangga perempuan miskin ekstrem ini, mayoritas adalah janda cerai mati yang memutuskan untuk tidak menikah lagi. Beban kepala rumah tangga perempuan umumnya lebih berat daripada kepala rumah tangga laki-laki karena mereka harus berperan ganda antara peran ekonomi, domestik, dan sosial (Mulawarman et al., 2020). Oleh karenanya, “waktu” bagi mereka sangat menjadi pembatas dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi.

Rumah tangga miskin ekstrem ini juga umumnya dikepalai oleh mereka yang usianya lanjut (42,1%). Usia lanjut (yaitu di atas 60 tahun) bagi kepala rumah tangga menciptakan keterbatasan tersendiri dalam mengakses pekerjaan tetap dengan pendapatan yang memadai. Kondisi kesehatan dan fisik yang cenderung mulai menurun membatasi peluang usaha dan bekerja bagi kepala keluarga khususnya yang bertempat tinggal di perkotaan. Di lokasi penelitian, banyak pula dijumpai kepala rumah tangga lanjut usia (lansia) yang hidup sendiri dan tidak bekerja. Bagi mereka (kepala rumah tangga janda dan lansia), biaya hidup terutama disokong oleh kerabat (anak/cucu/kerabat) yang tinggal jauh di luar komunitas maupun di dalam komunitas dan bantuan sosial dari pemerintah. Rumah tangga yang dikepalai lansia dan janda pada komunitas Taru umumnya telah menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua RT perempuan sebagai berikut: “*Teteh mah yang diprioritasin yatim, janda, sama lansia. Kalo yang muda mah gimana nanti kalo masih ada haknya baru teteh masukin ke daftar penerima bantuan, yang penting mah lansia aja dulu.*” (R, Ketua RT 07, 14/4/2023). Jenis pekerjaan utama dan kondisi lingkungan sekitar (pekarangan & bantaran sungai) dapat dipandang

Tabel 2. Persentase tertinggi rumah tangga miskin ekstrem menurut profil kepala rumah tangga dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, Komunitas Taru, tahun 2023.

Profil Kepala Rumah tangga Miskin Ekstrem dan Lingkungan Tempat Tinggalnya	Persentase (%)
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	
1. Laki-laki	63,2
Usia Kepala Rumah Tangga*	
1. Lanjut usia (≥ 60 tahun)	42,1
Jenis Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	
1. Karyawan (toko dan rumah makan)	15,8
2. Tidak bekerja	15,8
Pemanfaatan Pekarangan	
1. Tidak dimanfaatkan	63,2
Kerawanan tempat Bencana Banjir	
1. Tidak rawan	63,2
2. Rawan	36,8

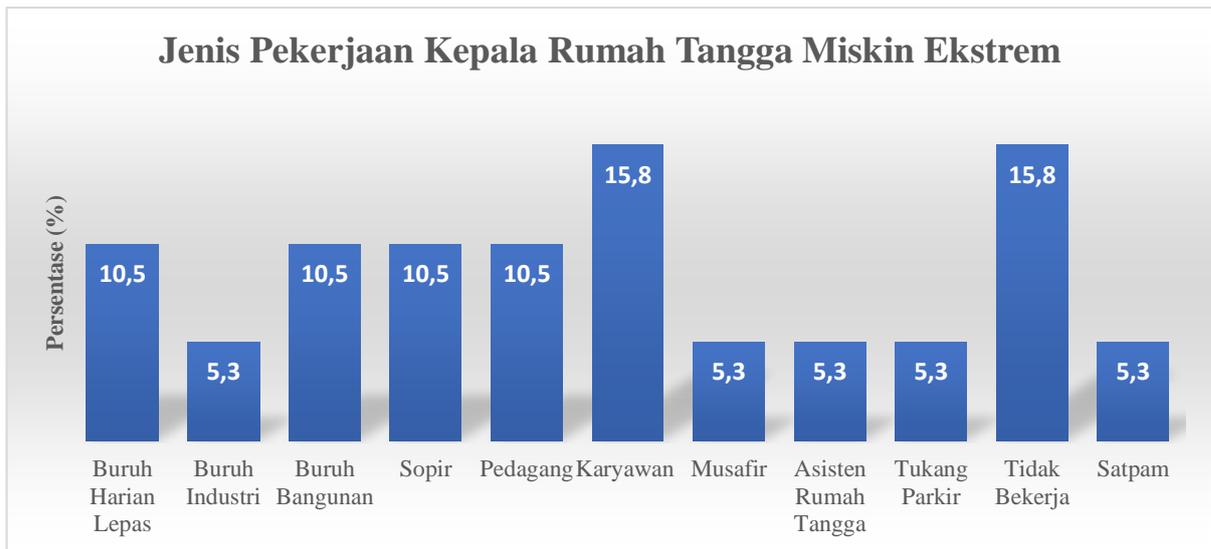
Keterangan: * = kategori usia menurut peraturan menteri kesehatan RI no 25 tahun 2016

sebagai sumberdaya sekaligus sumber kerentanan rumah tangga. Jenis pekerjaan akan menentukan apakah jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga memadai atau tidak (Jacobus et al., 2019). Pemanfaatan lahan pekarangan (tanah sekitar tempat tinggal) dapat menjadi salah satu sumberdaya rumah tangga pendukung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga seperti untuk bertanam-tanaman hortikultura, peternakan, dan sebagainya (Penny & Ginting, 1984). Adapun posisi tempat tinggal yang berdekatan dengan bantaran sungai akan menentukan kerentanan rumah tangga terhadap bencana banjir.

Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat satu jenis pekerjaan yang dominan digeluti oleh kepala rumah tangga miskin ekstrem yaitu sebagai karyawan toko dan rumah makan (15,8%), pedagang kecil (10,5%), buruh bangunan (10,5%), buruh serabutan/harian lepas (10,5%), disamping ada pula yang sama sekali tidak bekerja (15,8%). Kepala rumah tangga yang tidak bekerja seluruhnya adalah perempuan lansia yang berstatus janda cerai mati dan tidak tinggal serumah dengan anak-anaknya. Kepala rumah tangga perempuan yang tidak bekerja dapat bertahan hidup karena mengandalkan kiriman bantuan kerabat (anak dan cucu) yang tinggal berjauhan. Seringkali kiriman bantuan dari kerabat ini tidak mencukupi kebutuhan sehingga dengan berbagai cara mereka berupaya agar memperoleh bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan sosial yang diterima para kepala rumah tangga miskin ekstrem ini salah satunya adalah Program keluarga Harapan (PKH) yg boleh diakses penduduk lansia. Sebagai gambaran besarnya bantuan yang diperoleh dari PKH ini dinyatakan oleh informan sebagai berikut: “... *Kalo lansia Rp600.000/orang/3 bulan*” (J, Kader RT 01, 16/4/2023). Bentuk bantuan yang diterima Kepala rumah tangga lansia yang tidak bekerja dinyatakan oleh informan berikut:

“Terdapat bantuan PKH dari Dinsos, Dapodik, dan kelurahan untuk disabilitas, lansia, balita, ibu hamil, bayi, dan anak yang masih sekolah. Untuk anak SMP bantuan pendidikan sebesar Rp350.000/3 bulan dan anak SMA Rp500.000/3 bulan. Terus ada BPNT senilai Rp 600.000 yang dicairkan lewat kantor pos semua. Bantuan lewat e-warung diganti langsung barang berupa beras 10 kg, ayam 1 ekor, kacang ijo 1/4, buah-buahan, dan sayur (labu siam).” (HN, Kader RT 05, 16/4/2023)

Berdasarkan hasil temuan lapang, hanya 36,8% rumah tangga miskin ekstrem yang masih dapat memanfaatkan pekarangan sempitnya untuk bertanam sayuran seperti cabai dan tomat untuk mengurangi pengeluaran tunai kebutuhan dapur sehari-hari. Sementara sebagian besar rumah tangga sisanya (63,2%) sama sekali tidak memiliki pekarangan sehingga tidak dapat memanfaatkannya. Lokasi tempat tinggal yang saling berdekatan menyebabkan sekitar rumah tidak memungkinkan ditanami secara konvensional. Kesulitan mendapatkan tambahan bahan pangan untuk mengurangi pengeluaran bahan dapur, dinyatakan oleh informan sebagai berikut: “*Dari dulu gak ada. Emang kaya gini modelnya gak ada lahan kosong*” (HN, Kader RT 05, 16/4/2023).



Gambar 3. Persentase kepala rumah tangga miskin ekstrem menurut jenis pekerjaan, Komunitas Taru, Tahun 2023

Kondisi lingkungan hunian rumah tangga miskin ekstrem diantaranya selain padat dengan rumah berhimpitan, juga berada di bantaran sungai kecil. Lebih dari sepertiga dari rumah tangga miskin ekstrem menempati hunian yang rawan bencana banjir. Dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 26,3% rumah tangga mengalami satu kali banjir dan 10,5 % rumah tangga mengalami dua kali banjir. Sejumlah 63,2% rumah tangga miskin ekstrem menempati hunian di lokasi yang lebih tinggi, sehingga bebas dari kemungkinan bencana banjir. Letak geografis pemukiman rumah tangga miskin ekstrem ini umumnya berada pada kontur yang tidak rata. Namun demikian, warga mengamati bahwa terdapat pola bencana banjir besar per lima tahunan dan pada saat itu terdapat pola bantuan yang diberikan. Hal ini diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

“Banjir gak tentu di sini mah, tapi per lima tahun teh pasti banjir besar. Ada bantuan banjir dari partai PKS kaya makanan jadi tapi cuman sekali, dibagiin sama kader. Terus dari Kemensos sembako kaya beras, mie, minyak. Pakaian juga ada yang harus ngambil ke kelurahan tapi banyak yang gak ambil” (J, Kader RT 01, 16/4/2023)

Profil rumah tangga miskin ekstrem dalam penelitian ini juga akan ditinjau berdasarkan indikator Badan Koordinator Keluarga Bencana Nasional (2011). Terdapat delapan indikator yang diamati yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan (1) pangan, (2) sandang, (3) papan, (4) kesehatan, (5) tabungan, (6) alat komunikasi untuk Informasi, (7) hiburan/rekreasi, dan (8) partisipasi sosial. Berdasarkan delapan indikator tersebut, profil rumah tangga miskin ekstrem di lokasi penelitian tergambar pada Tabel 3.

Bila diamati sekilas, mayoritas rumah tangga miskin ekstrem dapat memenuhi kebutuhan minimum dalam hal pangan, papan, kartu bpjs, alat komunikasi, liburan dan partisipasi sosial. Namun, bila diamati lebih rinci, kualitas pemenuhan kebutuhan masih rendah. Berdasarkan Tabel 3 maka dapat dijelaskan kualitas pemenuhan kebutuhan minimum pada rumah tangga miskin ekstrem sebagai berikut:

1. Kebutuhan pangan rumah tangga miskin ekstrem (makan 2 kali sehari) terpenuhi, namun makanan tersebut merupakan pemberian orang lain (kerabat atau tetangga) dengan kualitas pangan ‘*ala kadarnya*’. Dalam hal kebutuhan air minum, rumah tangga miskin ekstrem telah dapat mengakses air bersih yang bersumber dari sumur bor yang dibangun untuk pemenuhan kebutuhan komunal atau milik bersama, bukan milik pribadi pada masing-masing rumah.
2. Kebutuhan sandang rumah tangga miskin ekstrem tidak pernah membeli pakaian baru karena keterbatasan finansial. Pakaian yang digunakan anggota rumah tangga miskin ekstrem berasal dari pemberian dan donasi dari orang lain (diantaranya dari para tetangga, kerabat, atau majikan tempat bekerja). Keterbatasan pemenuhan sandang ini digambarkan oleh informan sebagai berikut: “*...Kita ngeliat anaknya pake baju itu lagi-itu lagi, mereka dikasih baju tuh sama yang deket-deket.*” (HN, Kader RT 05, 16/4/2023)

Tabel 3. Persentase tertinggi rumah tangga miskin ekstrem menurut 8 indikator pemenuhan kebutuhan dasar (BKKBN), Komunitas Taru, tahun 2023.

Indikator		Persentase (%)
1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan		
1. Frekuensi makan	2 kali/hari	58
2. Akses sumber air minum	Sumur Bor/Pompa/Sanyo	37
2. Pemenuhan Kebutuhan Sandang		
1. Daya beli pakaian dalam satu tahun	Rendah/Tidak Pernah beli	53
3. Pemenuhan Kebutuhan Papan		
1. Status kepemilikan tempat tinggal	Milik sendiri (warisan)	89
2. Jenis Atap terluas	Asbes	68
3. Jenis lantai terluas	Keramik	63
4. Jenis dinding terluas	Tembok aci/plester	95
5. Kepemilikan jamban	Ada, tanpa <i>septic tank</i>	68
4. Pemenuhan Akses Kesehatan		
1. Tindakan penanganan anggota rumah tangga yang sakit	Mengonsumsi obat warung	47
2. Kepemilikan askes	Memiliki	74
5. Pemenuhan Tabungan		
1. Kepemilikan tabungan	Tidak memiliki tabungan	95
6. Pemenuhan Alat Komunikasi untuk Informasi		
1. Kepemilikan alat komunikasi	TV dan HP	95
7. Pemenuhan kebutuhan Hiburan/Rekreasi		
1. Frekuensi pergi liburan	1 kali/tahun	63
8. Pemenuhan Partisipasi Sosial		
1. Banyak jenis kegiatan yang diikuti	Mengikuti satu jenis kegiatan	74

3. Kebutuhan kesehatan dipenuhi dengan cara membeli obat warung. Sebagian besar rumah tangga miskin ekstrem tidak memanfaatkan layanan kesehatan setempat maupun asuransi BPJS yang mereka miliki. Alasan yang mereka kemukakan adalah karena mereka tidak memiliki biaya untuk transportasi ke puskesmas ataupun karena tidak ada pendamping untuk mengantarkan sampai ke lokasi pelayanan kesehatan.
4. Kebutuhan tabungan untuk mengatasi risiko kejadian tak terduga, sama sekali tidak dimiliki oleh rumah tangga miskin ekstrem. Sebanyak 95% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Kondisi ini digambarkan oleh anggota rumah tangga miskin ekstrem sebagai berikut: *'bagaimana mau menabung, kalau makan aja masih pas-pasan'* (R, RT 05, 11/4/2023). Pendapatan yang mereka peroleh hanya cukup untuk makan sehari-hari bahkan terkadang masih kurang. Kecilnya pendapatan ini menjadi salah satu pemicu sebagian masyarakat memutuskan meminjam uang pada "bank emok". "Bank emok" adalah salah satu kelembagaan pinjaman finansial yang beroperasi di kalangan komunitas miskin. Kelembagaan ini tidak formal, prosedurnya mudah sehingga banyak diminati warga, tetapi amat rentan menjadi musibah keuangan karena bunga yang ditetapkan cukup tinggi (sebesar 30 persen per tahun). Namun, tidak dapat dipungkiri beberapa warga terbantu oleh lembaga bank emok ini. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu responden sebagai berikut: *"minjem ke bank emok. Alhamdulillah sampe enam setengah taun lancar. Sampe saya boleh pinjam banyak, sampe dikasih 5 juta."* (R, RT 05, 11/4/2023).
5. Kebutuhan alat komunikasi umumnya terpenuhi (digunakan oleh 95% rumah tangga). Informasi pada rumah tangga miskin ekstrem diakses melalui televisi dan ponsel. TV yang mereka gunakan umumnya adalah pemberian atau pinjaman atau bahkan sekedar titipan dari anak yang tidak tinggal serumah lagi. Ponsel umumnya digunakan hanya oleh anak-anak yang masih bersekolah.
6. Pada hiburan atau rekreasi, sebanyak 63% rumah tangga miskin ekstrem hanya melakukan tamasya sekali dalam satu tahun. Umumnya, rumah tangga miskin ekstrem tidak memprioritaskan rekreasi karena uang yang ada lebih diprioritaskan untuk membeli kebutuhan pokok pangan. Apabila rekreasi dapat dilakukan, maka biasanya dilakukan hanya satu tahun sekali bersama keluarga pada

saat libur perayaan lebaran. Tempat rekreasi yang dikunjungi juga tempat wisata yang dekat dan bertarif murah.

7. Pemenuhan kebutuhan sosial atau partisipasi sosial rumah tangga miskin ekstrem umumnya berupa kegiatan interaksi diantara sesama warga di dalam komunitas. Kegiatan yang umumnya diikuti oleh rumah tangga miskin ekstrem (74%) adalah pengajian. Sebagian besar rumah tangga pada Komunitas Taru terlibat aktif pada kegiatan pengajian yang diselenggarakan tiga kali dalam seminggu untuk kalangan yang berbeda-beda (khusus kaum laki-laki, khusus kaum perempuan dan khusus remaja). Hampir setiap lingkungan Rukun Tetangga (RT) memiliki mushola yang dapat digunakan sebagai tempat pengajian dan ibadah lainnya. Kegiatan yang mulai jarang dilakukan adalah kegiatan kerja bakti. Seorang informan menjelaskan sebagai berikut: *“Kerja bakti jarang-jarang sekarang. Mungkin kalo mendekati 17 agustusan baru ada kerja bakti, selain itu gak ada, kegiatan yang ada paling pengajian. Ada pengajian RT ada pengajian beda RT.”* (J, Kader RT 01, 16/4/2023).

KESIMPULAN

Rumah tangga miskin ekstrem di perkotaan pada komunitas Taru, Kota Bogor, mencapai lebih dari sepertiga populasi (31,1%). Dari seluruh rumah tangga miskin ekstrem ini (31,1%), dapat dirinci lagi ke dalam kategori rumah tangga sangat miskin (15%) dan rumah tangga melarat (16%). Mayoritas rumah tangga miskin ekstrem dikepalai oleh laki-laki. Namun demikian, angka rumah tangga miskin ekstrem yang dikepalai perempuan juga cukup tinggi (lebih dari sepertiga rumah tangga miskin ekstrem). Umumnya rumah tangga miskin ekstrem dikepalai oleh lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan kepala rumah tangga miskin ekstrem umumnya berstatus janda cerai mati yang memutuskan tidak menikah lagi. Kepala rumah tangga miskin ekstrem umumnya bekerja sebagai pegawai restoran, buruh bangunan, pedagang, buruh serabutan dan tidak bekerja. Kondisi lingkungan tempat tinggal mereka kurang sehat karena berada di pemukiman padat, tidak memiliki pekarangan (63%), sebagian menghuni wilayah di dataran yang berkontur di bantaran sungai sehingga rawan banjir (1 sampai 2 kali/tahun).

Profil rumah tangga miskin ekstrem yang diamati menurut 8 indikator oleh BKKBN (2011) menunjukkan kecenderungan sebagai berikut: (1) frekuensi makan dapat dipenuhi 2 kali sehari meski dengan kualitas “ala kadar”nya dan sumber air minum diperoleh dari sumur bor yang dibuat untuk kepentingan komunal, (2) tidak mampu membeli baju baru per tahun, (3) rumah yang ditempati adalah rumah warisan yang kondisinya mulai rusak dan rawan runtuh serta jamban yang digunakan tidak memiliki *septic tank*, (4) perawatan kesehatan dipenuhi dengan cara membeli obat warung, serta kartu BPJS yang sudah dimiliki belum dapat dimanfaatkan karena keterbatasan finansial untuk biaya transport menuju pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas), (5) tidak memiliki tabungan sama sekali, (6) alat komunikasi dan informasi seperti TV dan HP diperoleh dari pinjaman kerabat (anak, cucu), (7) umumnya kebutuhan rekreasi hanya dipenuhi setahun sekali pada saat libur lebaran ke tempat yang dekat dan berbiaya murah, (8) partisipasi sosial dan interaksi sesama warga dilakukan saat mengikuti kegiatan pengajian yang telah membudaya di kalangan warga komunitas.

Upaya meningkatkan kesejahteraan pada rumah tangga miskin ekstrem yang secara demografis merupakan rumah tangga lanjut usia, perlu dilakukan dengan strategi khusus. Selain upaya pemberdayaan perlu dilakukan pada tingkat rumah tangga, juga perlu pemberdayaan di tingkat komunitas dengan dukungan pemerintah. Beberapa hal yang perlu diupayakan: (1) di tingkat kebijakan pemerintah yaitu: menciptakan lingkungan yang ramah lansia dalam hal (a) menciptakan kesempatan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik lansia mandiri, (b) memperbaiki sistem komunikasi dan pendataan kondisi kesehatan lansia, (c) meningkatkan akses lansia pada sarana kesehatan dengan memberi insentif pada pekerja sosial bagi lansia (*caregiver*) di tingkat komunitas untuk mendampingi lansia ke puskesmas, mendekatkan layanan kesehatan (posbindu) hingga ke tingkat dasa wisma, dengan mengintegrasikan program BPJS (d) memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan secara rutin, (e) mempermudah sistem dan mempermudah biaya transportasi umum bagi lansia dan pekerja sosial (*caregiver*), (f) memberi dukungan berupa insentif bagi penggerak komunitas yang mampu menyelenggarakan aktivitas keagamaan, mental dan spiritual, serta aktivitas rekreatif bagi lansia, (g) memberikan bantuan hukum bagi lansia miskin, dan (h) memberi perlindungan sosial dalam arti luas. (2) Di tingkat komunitas perlu diupayakan: (a) pembentukan kader pelayan sosial bagi lansia untuk membantu pelayanan di dalam rumah (*housekeeping*), (b) menyelenggarakan aktivitas sosial/ wadah

interaksi sesama anggota komunitas (misalnya: pengajian, olahraga, hiburan/rekreatif, dll), (c) mendorong tumbuhnya usaha-usaha pelayanan dalam rumah (*housekeeping*), *laundry* dan usaha makanan dan camilan sehat yang berbiaya murah, (d) membangun sistem komunikasi dan keamanan 24 jam, (e) menyelenggarakan pelayanan posbindu keliling dari rumah ke rumah bagi kelompok miskin lansia tidak mandiri dan pikun dalam komunitas. (3) Di tingkat rumah tangga miskin ekstrem perlu diupayakan: (a) peningkatan kapasitas keterampilan anggota rumah tangga untuk menjangkau peluang usaha dan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis, (b) meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga, (c) meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan pangan bagi lansia dan kategori usia anggota rumah tangga lainnya, (d) bimbingan/pendidikan informal untuk meningkatkan pengetahuan anggota rumah tangga tentang kesehatan fisik dan psikis lansia dan cara berinteraksi yang harmonis antara anggota keluarga maupun dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinator Keluarga Bencana Nasional. (2011). *Batasan dan Pengertian MDK*. BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa), 2021-2022*. BPS.
- Hidayat, A. (2022). Implementasi pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Papatung*, 5(2), 55–62. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.624>.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.32744.19.3.2018>.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2011). *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. LIPI Press.
- Mulawarman, W. G., Wahyuningsih, T., Rokhmansyah, A., & Pagoray, H. (2020). *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019: Perempuan Kepala Rumah Tangga Miskin yang mempunyai Usaha Ekonomi di Bontang, Samarinda, dan Kutai Timur*. CV Istana Agency.
- Penny, D. H., & Ginting, M. (1984). *Pekarangan Petani dan Kemiskinan*. Gadjah Mada University Press.
- Sajogyo. (1977). *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Pangan Minimum*. LPPM Institut Pertanian Bogor.
- Supranto, J. (2000). *Statistik: Teori dan Aplikasi* (6th ed.). Erlangga.
- United Nations. (1995). *The Copenhagen Declaration and Programme of Action: World Summit for Social Development*. UN Department of Publications.
- World Bank. (2015). *Paritas Daya Beli dan Ukuran Riil Ekonomi Dunia: Laporan Komprehensif Program Perbandingan Internasional 2011*. Bank Dunia.